

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL **AGST** SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 **29** 30 31

HALAMAN : 8

TAHUN 2004

DPR Minta Polri Cepat Tuntaskan Pengusutan Kasus Buyat

epuk tangan 18 warga Buyat, Sulawesi Utara, beberapa kali membahana di ruang rapat komisi VIII DPR, Selasa (24/8) lalu. Setidaknya dengan pernyataan para anggota dewan dalam rapat kerja dengan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nabeli Makarim, sekaligus sempat dengar pendapat umum dengan LBH Kesehatan, memberi harapan baru bagi mereka yang kini didera pencemaran lingkungan tempat mereka tinggal dan mencari nafkah.

Dari 20 anggota komisi itu yang angkat bicara, semua menyatakan keprihatinan mereka atas musibah yang menimpanya warga Buyat. Mereka sangat menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan lambat dalam menangani persoalan warga di sana.

"Departemen Kesehatan (epkes) seharusnya cepat turun tangan untuk segera memberikan pengobatan terhadap warga yang kesehatannya terganggu akibat pencemaran di lingkungannya. Kalau memang anggarannya masih kurang, bisa diajukan lagi melalui ABT (Anggaran Biaya Tambahan)," kata Syamsul Achri dari Fraksi Partai Golkar.

Tidak hanya Syamsul, anggota lainnya pun melontarkan hal senada. Priyo Budiantoso, salah satunya, mengingatkan bahwa anggaran untuk Depkes dalam APBN cukup besar. Dan sepengetahuannya, sebagian besar pelaksanaan anggaran tersebut untuk menanggulangi masalah kesehatan masyarakat. Oleh

sebab itu, dia mendesak Menkes, melalui Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Depkes, Umar Fachmi, yang hadir dalam rapat itu, agar segera memberikan pengobatan terhadap warga di sana dengan biaya yang ditanggung oleh negara.

Begitu pula halnya dengan biaya berobat warga Buyat yang kini berada di Jakarta. Para anggota komisi itu pun mendesak Menkes segera mengganti biaya pengobatan yang telah diupayakan secara swadaya oleh masyarakat dan LBH Kesehatan. Bahkan Royani Haminullah, dari Fraksi PDI Perjuangan, mengingatkan agar proses penggantian tidak lagi dihambat melalui birokrasi yang berbelit-belit.

Harus Tuntas

"Yang penting kesehatan warga kembali pulih," tuturnya. Apalagi, cari hasil penyelidikan polisi atas kasus pencemaran di Buyat, yang antara lain juga meneliti dampaknya itu terhadap kesehatan masyarakat, selain harus segera direspons oleh Depkes

dan Menteri Lingkungan Hidup, juga harus tuntas siapa yang harus bertanggung jawab dalam kasus tersebut.

Penjelasan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri, Komjen Suyitno Landung, yang juga hadir di situ, Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) sudah menyelesaikan hasil penelitian seluruh kasus pencemaran, baik di Teluk Buyat dan Rata-totok. Dari sampel tersebut, paparnya, secara keseluruhan konsentrasi merkuriium (Hg) dan arsen (As) telah melampaui baku mutu. Untuk air laut dan sungai, dia men-

contohkan, pencemaran Hg dan As di Sungai Buyat dan Teluk Buyat telah melampaui baku mutu yang ditetapkan pemerintah.

Dia mengungkapkan, kandungan Hg di hilir Sungai Buyat mencapai 0,0012 part per million (ppm) dan di hilir Teluk Buyat 0,004 ppm. Pihaknya kini tengah menjadwalkan pertemuan dengan para ahli untuk menganalisisnya lebih lanjut. Diharapkan hasil dari situ, polisi bisa melakukan pengusutan terhadap pihak-pihak yang dianggap paling bertanggung jawab dalam kasus tersebut.

Keterangan Direktur Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polri, Brigjen Suharto, yang mendampingi Landung, penyidik telah memeriksa 24 orang di Mabes Polri dan 36 di Polda Sulut. Dari jumlah itu, dua orang pejabat PT NMR di Mabes Polri dan dua orang di Polda Sulut.

Atas penjelasan dari pihak Polri tersebut, para anggota komisi minta agar peng-

usutannya tidak mandeg di tengah jalan. Untuk itu, perlu ditargetkan kapan penyelidikan dan penyidikan itu bisa tuntas sehingga bisa dilanjutkan hingga ke tingkat penuntutan di pengadilan. "Kami tidak ingin kasus itu berlarut-larut," kata Evita Asmalda dari Fraksi Partai Golkar.

Tanggapan Suyitno Landung atas desakan tersebut, dia tak bisa memberikan ancar-ancur waktunya secara tepat. Tapi ia berjanji segera menyelesaikannya dengan cepat.

Setelah empat setengah jam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII, Zainal Arifin, dari Fraksi PDI Perjuangan, berlangsung, sebelum ditutup menghasilkan kesimpulan-kesimpulan, antara lain DPR mendesak kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar segera membantu pengobatan warga Buyat yang kesehatannya terganggu akibat pencemaran lingkungan di sana. Dampak

44

sosial dan ekonomi yang timbul akibat pencemaran tersebut juga harus segera ditanggulangi.

Selain itu, DPR mendukung dan minta kepada polisi agar menindaklanjuti pengusutannya terhadap kasus pencemaran di Teluk Buyat. Untuk itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diminta untuk membantu jajaran kepolisian dalam mengusut masalah tersebut. Bahkan sejumlah anggota komisi itu menyatakan, upaya hukum yang kini tengah ditempuh diharapkan benar-benar serius dilaksanakan.

Berkait dengan upaya hukum tersebut, pada pagi harinya, bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), gugatan masyarakat Buyat melalui LBH Kesehatan, selaku kuasa hukum mereka, terhadap Departemen Kesehatan, telah dibuka oleh Ketua Majelis Hakim Soedarjatmo SH. Namun sidang diputuskan untuk ditunda. (W-5)



BENJOLAN - Rachmad Modeong (23), salah satu warga Buyat, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, menunjukkan benjolan di pergelangan tangannya yang diduga akibat pencemaran di Teluk Buyat. Dia bersama enam warga Buyat datang ke Jakarta untuk memperkuat bukti telah terjadi pencemaran di sana.